



Analisis Wacana Kritis Pada Meme Politik Terkait Wacana Kenaikan Pajak Yang Mencekik di Media Sosial

Sry Wahyuni^{*1}, Dardanila², Latifah Yusri Nasution³
^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara, Medan, 20153, Indonesia

*Corresponding Author: dardanila@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 22 May 2025

Revised: 04 June 2025

Accepted: 26 June 2025

Available online on August 2025

E-ISSN: 2964-1713

P-ISSN: 2775-5622

ABSTRACT

The title of this research is "Critical Discourse Analysis on Political Memes related to the Discourse on Strangling Tax Hikes on Social Media". This research aims to analyze the text dimensions of political memes regarding tax increases on social media using the Critical Discourse Analysis (AWK) approach of Teun A. Van Dijk's model. This approach includes three main structures, namely macro structure, superstructure, and micro structure. The research used qualitative methods with data collection techniques through online observation and documentation. The data sources consist of five political memes taken from Instagram, Facebook, and X (Twitter), and are supported by official documents and mass media articles. The results show that in the macro structure, the main themes that emerge in the memes include criticism of the tax increase policy that is considered burdensome to the people, the 12% VAT burden, and a comparison with the obligation of zakat in Islamic teachings. The government is portrayed as if it is blackmailing the people through these fiscal policies. In the superstructure, varied schematic patterns were found, where most memes followed the flow of the title, main idea, and supporting ideas, while others did not fully follow the scheme. On the microstructure, the analysis identified the use of various stylistics, such as satire, hyperbole, rhetoric, comparison, and irony. Some memes utilize visual stylistics without explicit lingual elements but still convey sharp criticism of the government. This study concludes that political memes act as a medium of expression of social criticism of tax policy in Indonesia, represent public dissatisfaction, and show the economic inequality felt by the public.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Tax Hike, Social Media, Political Memes, Teun A. Van Dijk.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "Analisis Wacana Kritis Meme Politik terkait Wacana Kenaikan Pajak yang Mencekik di Media Sosial". Penelitian ini dilakukan guna mengkaji dimensi teks pada meme politik mengenai kenaikan pajak di media sosial menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. Van Dijk. Pendekatan ini mencakup tiga struktur utama, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi online dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas lima meme politik yang diambil dari Instagram, Facebook, dan X (Twitter), serta didukung oleh dokumen resmi dan artikel media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada **struktur makro**, tema utama yang muncul dalam meme mencakup kritik terhadap kebijakan kenaikan pajak yang dianggap memberatkan rakyat, beban PPN 12%, dan perbandingan dengan kewajiban zakat dalam ajaran Islam. Pemerintah digambarkan seolah-olah memeras rakyat melalui kebijakan fiskal tersebut. Pada **superstruktur**, ditemukan pola skematik yang bervariasi, di mana sebagian besar meme mengikuti alur judul, gagasan utama, dan gagasan pendukung, sementara sebagian lainnya tidak sepenuhnya mengikuti skema tersebut. Pada **struktur mikro**, analisis mengidentifikasi penggunaan berbagai gaya bahasa, seperti sindiran satir, hiperbola, retorik, perbandingan, dan ironi. Beberapa meme memanfaatkan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.
<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

stilistika visual tanpa elemen lingual eksplisit namun tetap menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meme politik berperan sebagai media ekspresi kritik sosial terhadap kebijakan pajak di Indonesia, merepresentasikan ketidakpuasan masyarakat, dan memperlihatkan ketimpangan ekonomi yang dirasakan publik.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Kenaikan Pajak, Media Sosial, Meme Politik, Teun A. Van Dijk.

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan mengekspresikan opini, termasuk dalam merespons kebijakan publik. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, tetapi juga sebagai arena politik tempat berbagai wacana publik, seperti kenaikan pajak, diperdebatkan secara luas melalui berbagai bentuk komunikasi digital. Salah satu bentuk ekspresi politik yang berkembang di era digital adalah meme. Sebagai produk budaya digital, meme menjadi sarana yang efektif dalam membentuk opini publik karena sifatnya yang mudah diakses, dipahami, dan dibagikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana meme politik dikonstruksi dan bagaimana wacana yang terkandung di dalamnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kerangka kebebasan berekspresi, Pasal 28 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk lainnya yang diatur oleh undang-undang. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi masyarakat untuk mengemukakan pandangannya secara terbuka, termasuk melalui sarana digital seperti meme. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers turut menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan sarana komunikasi massa yang memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Kebebasan ini menjadi landasan penting bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan pandangan politik terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi ruang demokratis bagi partisipasi publik dalam wacana sosial-politik.

Sebagian masyarakat mulai menyuarakan pendapat mereka terkait isu kenaikan pajak melalui media sosial, bahkan sebelum keputusan resmi diumumkan. Tidak hanya lewat status, tetapi juga melalui meme politik yang beredar luas dan membentuk opini publik mengenai kebijakan tersebut. Banyak masyarakat menyuarakan lewat foto, video, sampai meme. Berbagai macam hal yang mereka pos di media sosial terhadap kenaikan pajak yang bisa berupa ejekan atau sindiran terhadap presiden dan pemerintah. Dalam konteks ini, meme menjadi bentuk kritik visual yang efektif karena sifatnya yang sederhana, cepat menyebar, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Kritik yang disampaikan di dalam meme seringkali bersifat sarkastik atau humoris, tetapi tetap mampu mencerminkan aspirasi dari keresahan masyarakat secara mendalam. Misalnya, meme yang menggambarkan “rakyat bertubuh kecil” yang tercekik oleh beban pajak menyoroti bagaimana masyarakat merasa tertekan oleh kebijakan ekonomi yang dirasa tidak adil. Oleh karena itu, meme telah memperkaya media kritik masyarakat Indonesia (Savitri, 2018).

Istilah meme pertama kali diperkenalkan oleh Richard Dawkins dalam bukunya *The Selfish Gene* (1976), di mana ia menggambarkan meme sebagai unit budaya yang menyebar dan bereplikasi layaknya mutasi gen. Meme umumnya muncul dari peristiwa yang menarik, ungkapan yang lucu atau khas, hingga kesalahan penulisan (Shifman, 2013), dan kemudian menyebar melalui komentar, peniruan, parodi, atau liputan media (Bauckhage, 2021). Format meme bisa beragam, mulai dari film, video, gambar, hingga frasa atau ungkapan tertentu. Beberapa kreator bahkan menggabungkan elemen gambar dengan teks, atau menyesuaikannya dengan referensi dari video game, film, tokoh selebritas, maupun isu-isu politik. Oleh karena itu, meme internet menuntut adanya kreativitas dari pengguna dalam menciptakan dan menafsirkan makna yang berkaitan dengan simbol, kata-kata, serta konteks tertentu (Rina dkk., 2020). Analisis wacana kritis merupakan pendekatan dalam kajian komunikasi yang bertujuan untuk memahami bagaimana strategi wacana dalam meme dapat memengaruhi pemirsa dan secara halus diterima sebagai kebenaran. Pendekatan ini tidak sekadar memandang wacana sebagai teks, melainkan sebagai praktik sosial yang diciptakan dengan tujuan dan kepentingan tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah struktur wacana dalam meme politik yang membahas wacana kenaikan pajak yang mencekik di media sosial dikonstruksi melalui analisis dimensi teks berdasarkan pendekatan Teun A. Van Dijk?

2. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berpijak pada anggapan bahwa setiap permasalahan memiliki sifat dan karakteristik yang unik serta tidak dapat disamakan antara satu dengan lainnya (Rahmani, 2022). Metode penelitian ini lebih mengutamakan analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Analisis isi kualitatif memiliki kecenderungan memaparkan isi media dilihat dari konteks dan proses dari dokumen-dokumen sumber sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam dan rinci mengenai isi media serta mampu menjelaskan keterkaitan isi media dengan konteks realitas sosial yang terjadi. Hal itu dikarenakan paradigma kajian analisis isi kualitatif memandang pesan media sebagai himpunan lambang atau simbol yang merepresentasikan budaya tertentu dalam lingkup kehidupan masyarakat (Ida, 2006, sebagaimana dikutip dalam Sumarno, 2020).

Langkah-langkah teknis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Observasi daring dilakukan dengan menitikberatkan pada unggahan meme yang mengangkat tema kenaikan pajak sebesar 12% dan penggunaan tagar #kenaikanpajamencekik. Media sosial yang menjadi sumber pengumpulan data meliputi: (1) Instagram: Menggunakan kata kunci seperti kenaikan pajak, pajak 12%, pajak mencekik, serta eksplorasi akun-akun meme politik. (2) X (Twitter): Pencarian dengan tagar seperti #PajakMencekik, #KenaikanPPN12%, dan analisis isu pajak yang banyak diperbincangkan. (3) Facebook: Observasi terhadap grup dan halaman yang membahas kebijakan pajak dan isu ekonomi. Untuk memastikan relevansi data, peneliti menetapkan beberapa kriteria pemilihan meme: (1) Meme harus secara eksplisit membahas isu kenaikan pajak 12% dan mengandung unsur kritik, dukungan, atau reaksi terhadap kebijakan tersebut. (2) Meme berasal dari platform media sosial populer dan memiliki interaksi (*like*, komentar, *share*) sebagai indikasi perhatian publik. (3) Meme diposting dalam periode tertentu, sejak wacana kenaikan pajak mencuat hingga batas waktu pengumpulan data. (4) Meme yang dipilih memiliki keterbacaan tinggi dan format jelas (*teks dan gambar*).

Selanjutnya, penulis melakukan dokumentasi. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan peristiwa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Peneliti melakukan dokumentasi dengan: (1) Mengumpulkan dan menyimpan meme dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) dari media sosial. (2) Mencatat informasi penting: tanggal unggahan, jumlah interaksi (*like*, komen, *share*), dan akun yang mengunggah. (3) Mengelompokkan meme berdasarkan pola kritik yang disampaikan. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi online dan dokumentasi diidentifikasi dan difilterisasi. Proses ini meliputi: (1) Memilah meme yang relevan dan berkualitas baik. (2) Mengeluarkan meme yang tidak sesuai kriteria (*buram*, teks tidak terbaca, atau tidak relevan dengan topik penelitian). Terakhir, penulis melakukan analisis data terhadap meme yang sudah teridentifikasi menggunakan pendekatan Van Dijk, yaitu struktur teks, dilihat narasi dan konteks dalam teks pada meme.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari meme politik yang beredar di media sosial seperti Instagram, X, dan Facebook, yang membahas isu kenaikan pajak oleh pemerintah. Meme-meme tersebut mengandung sindiran, kritik sosial, hingga humor sarkastik yang menjadi media alternatif dalam menyampaikan aspirasi dan respon kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Tabel 1. Hasil Analisis Dimensi Teks

NO	Data Meme	Struktur Mikro	Superstruktur	Struktur Makro
1.		Kritik terhadap kebijakan kenaikan pajak yang dianggap memberatkan rakyat.	Pola penyajian yang digunakan dimulai dengan menyampaikan gagasan pendukung terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan gagasan utama.	Gaya bahasa sindiran satire yang hiperbola dan gaya bahasa retorik.

Meme data 1 gambar 1
Screenshot Instagram

3.2 Pembahasan

Meme politik yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana lain bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, meme tidak semata-mata berperan sebagai sarana hiburan, melainkan juga sebagai representasi budaya yang sarat makna, mencerminkan keresahan publik melalui penggunaan bahasa yang satiris, ironi, serta simbol-simbol visual. Dengan membuat bahasa dan gambar secara kreatif, meme-meme ini menjadi sarana penyampaian kritik sosial yang kuat dan mudah diterima oleh khalayak luas.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis meme dengan tema kenaikan pajak yang mencekik di media sosial dari aplikasi instagram, X, dan facebook. Penulis menggunakan teori analisis wacana kritis menurut Teun A. Van Dijk yaitu dimensi teks (struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro). Untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana struktur teks dalam meme politik tentang kenaikan pajak dikonstruksi, pembahasan berikut akan menguraikan analisis dimensi teks berdasarkan kerangka teori Van Dijk, yang mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

a. Struktur Makro

Makro struktur dalam pendekatan analisis wacana kritis menurut Van Dijk yang berhubungan dengan tema atau ide pokok yang membentuk keseluruhan isi teks. Berdasarkan hasil analisis terhadap kumpulan meme politik mengenai kenaikan pajak yang mencekik, tema utama yang mendominasi adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat. Tema ini mencerminkan aspirasi publik terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai tidak adil dan menambah beban rakyat kecil. Seluruh meme dalam data penelitian menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan kenaikan pajak melalui penggunaan bahasa yang provokatif, sarkastik, serta visual yang sarat makna simbolik.

b. Superstruktur

Secara sederhana, skema adalah cara komunikator meletakkan pesan penting yang ingin disampaikan kepada pembaca. Meme berbeda dengan wacana- wacana yang lain yang memiliki skema yang berbeda dalam hal penyajian informasi. Hal itu disebabkan karena meme menggabungkan gambar dan tulisan dalam satu tempat utuh, maka teks yang ditampilkan adalah teks yang padat dan tidak berupa paragraf panjang karena tidak memungkinkan yang seringkali teks ini ada sebelum gambar, diantara gambar atau di bawah gambar. Bila dilihat dari komponennya, meme terdiri atas judul, gagasan utama, gagasan pendukung, lalu dipertegas dengan gambar. Komponen meme tersebut dibagi ke dalam empat pola skema, yaitu 1) skema yang dimulai dari pola judul, gagasan utama diikuti gagasan pendukung, 2) skema yang dimulai dari pola gagasan utama diikuti gagasan pendukung, 3) skema dengan pola gagasan pendukung terlebih dahulu baru diikuti gagasan utama, dan 4) skema dengan pola gagasan utama tanpa gagasan pendukung dan judul. Pada umumnya skema 2 dan 3 tanpa disertai dengan judul dimaksudkan untuk menonjolkan gambar atau tulisan sebagai inti dari gagasan utama atau pendukung dari meme tersebut. Begitu pula, skema 4 digunakan untuk menonjolkan gagasan utama yang dipertegas dengan gambar.

c. Mikro Struktur

Meme memiliki struktur mikro yang berbeda Berbeda dengan artikel di koran atau berita di majalah yang umumnya memiliki struktur teks yang lengkap, meme justru cenderung minim unsur kebahasaan. Teks dalam artikel media cetak tersebut biasanya memuat unsur semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik secara rinci dan menyeluruh. Sementara itu, meme hanya menyajikan teks yang singkat dan sederhana, biasanya dipadukan dengan elemen visual berupa gambar sebagai pendukung makna.

Berdasarkan hasil analisis dimensi teks yang telah dilakukan, pada meme-meme bertema kenaikan pajak yang mencekik dapat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 1. Screenshot Instagram @chelseacool100

Dilihat dari segi struktur teks secara makro, meme data 1 pada gambar 1 bertema kritik terhadap kebijakan kenaikan pajak yang dianggap memberatkan rakyat. Hal ini dapat diketahui dari tulisan “RAMPAS TEROS!” “#TOLAKPPN12%”, dan “#PAJAKMENCEKIK” tulisan tersebut menunjukkan bahwa teks ini jelas menggambarkan narasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang dirasa memberatkan. Selain itu, gambar sebuah tangan berjas yang melilit tubuh seseorang dapat diartikan sebagai tangan yang mencengkeram atau membelenggu, melambangkan tekanan pajak yang dianggap menyesak rakyat. Mencengkeram menunjukkan kekuatan yang menekan dan menahan, sedangkan belenggu melambangkan keterbatasan gerak atau kondisi terjebak yang sulit dilepaskan, seperti beban pajak yang dirasakan rakyat.

Dilihat dari segi struktur teks secara superstruktur, meme data 1 pada gambar 1 termasuk dalam skema dengan pola gagasan pendukung terlebih dahulu, kemudian diikuti gagasan utama. Hal ini terlihat dari teks “RAMPAS TEROS!” sebagai gagasan pendukung karena membangun konteks kritik sebelum menegaskan pesan utama, gagasan pendukung ini diperkuat oleh gambar tangan berjas yang mencengkrum tubuh seseorang, melambangkan kondisi terjebak yang sulit dilepaskan, seperti beban pajak yang dirasakan rakyat. Sedangkan “#TolakPPN12%” dan “#PAJAKMENCEKIK” sebagai gagasan utama, yang menyampaikan maksud utama dari meme yaitu protes terhadap kebijakan pajak.

Dilihat dari segi struktur teks secara mikro, meme data 1 pada gambar 1 dapat diketahui secara sindiran satire yang hiperbola dan retorik. Gaya bahasa sindiran satire merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sindiran, kritikan, atau gagasan dengan cara halus dan seringkali dibungkus dengan komedi, dapat dilihat dari penggunaan kata “RAMPAS TEROS!”. Kalimat “RAMPAS TEROS!” ditulis dengan ejaan tidak baku, yaitu, “TEROS” yang seharusnya ejaan baku yaitu “terus”, mencerminkan gaya bahasa informal. Diksi “RAMPAS” menunjukkan tindakan paksa dan kasar, menggambarkan pajak sebagai beban yang diambil dari rakyat secara tidak adil. Gaya bahasa hiperbola merupakan gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu, terlihat dalam ilustrasi visual karakter yang dicengkram oleh tangan berjas sehingga mengeluarkan kertas merah muda yang diartikan sebagai uang rupiah. Menggambarkan pemaksaan seolah-olah rakyat sedang dicengkram secara ekonomi oleh kebijakan pemerintah. Penulisan caption “RAMPAS!!!!” dengan penggunaan tanda seru secara berulang merupakan bentuk penulisan yang tidak baku, tetapi sengaja digunakan untuk menegaskan ekspresi emosi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kreator meme ingin mengekspresikan kemarahan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut secara emosional. Sementara itu, caption “PAJAK APA PALAK?” menggunakan gaya bahasa retorik gaya bahasa yang digunakan untuk mencapai efek tertentu pada pendengar atau pembaca, biasanya melalui penggunaan bahasa yang tidak biasa atau penyimpangan dari konstruksi bahasa yang standar seperti kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Seperti caption yang ada pada meme yang bertujuan menggiring opini bahwa kebijakan pajak telah melampaui batas kewajaran dan bahkan dianggap menyerupai tindakan premanisme.

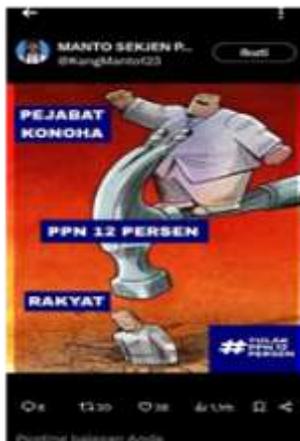


Gambar 2. Screenshot instagram @pmii_unpad

struktur makro dalam meme data 2 pada gambar 2 menunjukkan bahwa tema yang diangkat adalah pematokan pajak oleh pemerintah terhadap rakyat. Hal ini ditunjukkan melalui perbandingan visual antara ayam jantan dan ayam betina. Ayam jantan diasosiasikan dengan pemerintah yang sedang mematok ayam betina yang melambangkan rakyat. Posisi ayam betina yang dipatok dan tidak memberikan perlawanan dapat diartikan sebagai simbol dari rakyat yang pasif dan tidak berdaya dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Visualisasi ini merupakan bentuk kritik sosial terhadap perilaku elite kekuasaan yang dianggap mengambil keuntungan secara sepihak dari rakyat yang mereka pimpin. Rakyat, dalam hal ini, digambarkan tidak memiliki kekuatan atau kendali atas apa yang terjadi, melainkan hanya menjadi pihak yang dirugikan.

Jika ditinjau dari struktur teks pada level superstruktur, meme pada data 2 dalam gambar 2 mengikuti pola penyajian yang dimulai dengan gagasan pendukung, kemudian diakhiri dengan gagasan utama. Hal ini dapat dilihat pada tulisan “MAU BANGUN PAGI, MAU BANGUN SIANG REZEKI KITA TETAP DIPATOK!” merupakan gagasan pendukung dan tulisan “DIPATOK PAJAK 12%” sebagai gagasan utama. Tulisan “DIPATOK PAJAK 12%” sebagai gagasan utama, karena kreator meme ingin menyampaikan kondisi umum masyarakat. Kalimat “MAU BANGUN PAGI, MAU BANGUN SIANG, REZEKI KITA TETAP DIPATOK” merepresentasikan kondisi sosial masyarakat yang mengalami tekanan akibat kebijakan perpajakan yang berlaku. Ungkapan ini menyiratkan bahwa sekeras apa pun usaha individu dalam memperoleh penghasilan baik yang bekerja sejak pagi hari maupun yang memulai aktivitas di waktu siang hasil kerja tersebut tetap dikenai potongan dalam bentuk pajak. Selanjutnya kalimat “DIPATOK PAJAK 12%” merupakan gagasan utama dari meme yang berfungsi sebagai klimaks atau puncak dari pesan wacana yang ingin disampaikan. Secara struktural, kalimat ini muncul setelah penyampaian gagasan pendukung, yang sebelumnya membangun narasi mengenai ketidakberdayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak. Dalam konteks superstruktur menurut Teun A. Van Dijk, kalimat ini merepresentasikan inti pesan atau ide pokok dari keseluruhan teks visual, yaitu kritik terhadap besarnya beban pajak yang dirasakan oleh masyarakat.

Ditinjau dari struktur mikro, meme data 2 pada gambar 2 mengandung makna secara semantik serta memuat sindiran bernuansa satire. Semantik merupakan kajian linguistik yang berfokus pada arti dari kata, frasa, maupun kalimat secara umum. Di dalam meme ini terdapat kalimat yang mempunyai makna sebenarnya seperti dalam pernyataan “MAU BANGUN PAGI, MAU BANGUN SIANG REZEKI KITA TETAP DIPATOK!” kalimat ini mengandung pesan yang cukup filosofis yaitu menggambarkan keyakinan bahwa hasil hidup (rezeki) tidak selalu bergantung pada usaha (waktu bangun pagi atau siang), tetapi ada faktor eksternal seperti takdir. Selain itu, meme data 2 pada gambar 2 menggunakan gaya bahasa sindiran satire merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan kritikan atau terhadap suatu hal dengan cara menertawakan atau mengejek dengan unsur humor seperti visual ayam betina yang diasosiasikan sebagai rakyat dipatok oleh ayam jantan yang melambangkan pemerintah untuk menyindir pemerintah yang mematok pajak 12%.



Gambar 3. Screenshot X @KangManto123

Dilihat dari segi struktur teks secara makro, meme data 3 pada gambar 3 bertema beban PPN 12% bagi rakyat. Hal ini dapat diketahui dari gambar patung yang diindikasikan rakyat yang sedang dipukul oleh palu yang diindikasikan beban PPN 12 PERSEN yang diberatkan oleh orang yang berbadan besar yang dimaksud dengan pejabat konoha. Penggunaan istilah "Pejabat Konoha" dalam meme ini merujuk pada pejabat yang berkuasa atau otoritas yang ada dalam sistem pemerintahan. Konoha adalah nama sebuah desa fiktif dalam serial anime Naruto, yang dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Hokage dan pejabat-pejabat lainnya. Dalam konteks meme ini, "Pejabat Konoha" merujuk pada pemerintah atau pihak berwenang yang dianggap memiliki kekuasaan besar dalam kebijakan pajak.

Dilihat dari segi struktur teks secara superstruktur, meme data 3 pada gambar 3 tidak termasuk dalam empat komponen skema dalam superstruktur. Hal ini dikarenakan meme data 3 pada gambar 3 tidak memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam komponen skema, yaitu judul, gagasan utama, gagasan pendukung tetapi meme data 3 memiliki satu unsur lain yang menjadi ciri khas dari meme, yaitu komponen gambar. Oleh karena itu, meme data 3 termasuk dalam skema visual, karena hanya mengandung komponen gambar saja. Tulisan yang tertera pada gambar hanya menunjukkan label "pejabat konoha", "PPN 12 PERSEN", dan "rakyat" saja.

Jika ditinjau dari struktur mikro teks, meme pada data 3 gambar 3 tidak dapat dianalisis secara semantik maupun sintaksis karena tidak mengandung unsur kebahasaan. Namun, secara stilistika, melalui elemen visualnya, dapat dikenali bahwa meme tersebut menggunakan gaya bahasa perbandingan antara dua hal yang dianggap memiliki kemiripan atau kesamaan, sehingga menciptakan kesan yang lebih kuat dan jelas contohnya seperti visual meme data 3 pada gambar 3 di atas membandingkan pejabat dengan rakyat kecil. Selain gaya bahasa perbandingan, meme tersebut juga mengandung sindiran untuk menyindir pejabat yang membebankan rakyat dengan PPN12%.



Gambar 4. Screenshot facebook @POLITIK INDONESIA

Dilihat dari segi struktur teks secara makro, meme data 4 pada gambar 4 bertema kritik terhadap kebijakan pajak negara melalui perbandingan dengan kewajiban zakat dalam ajaran Islam. Meme ini menyoroti

perbandingan antara kewajiban keagamaan seperti zakat 2,5% dengan kewajiban negara yaitu pajak 12% untuk membangun kesan bahwa kebijakan pajak negara dianggap berlebihan dan menindas rakyat.

Dilihat dari segi struktur teks secara superstruktur, meme data 4 pada gambar 4 mengikuti pola gagasan utama tanpa gagasan pendukung. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat “AGAMA CUMA MINTA 2,5%, EHH NEGARA MINTA 12%” yang menjadi pusat pesan dalam meme. Kalimat tersebut membandingkan secara langsung antara kewajiban zakat dalam Islam dengan besaran pajak yang ditetapkan oleh negara. Frasa “EHH NEGARA MINTA 12%” menghadirkan efek kejutan sekaligus mengandung unsur sindiran, yang memperkuat kontras logika dan emosi dalam wacana.

Dilihat dari segi struktur teks secara mikro, meme data 4 pada gambar 4 dapat diketahui secara sindiran ironi, hiperbola dan perbandingan. Sindiran ironi merupakan jenis majas sindiran yang menggunakan pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan untuk menyampaikan sindiran halus. Contohnya dapat dilihat pada kalimat “AGAMA HANYA MENETAPKAN 2,5%, EHH NEGARA MINTA 12%” merupakan sindiran ironi karena meme ini menyampaikan pesan secara tidak langsung dengan membandingkan kontras. Sindiran ini seolah menyampaikan bahwa negara "lebih rakus" dari agama, padahal konteksnya berbeda. Ini merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pajak yang dirasa mencekik. Selanjutnya kalimat “AGAMA CUMA MINTA 2,5%, EHH NEGARA MINTA 12%” menggunakan gaya berlebihan untuk menimbulkan efek dramatis. Kata-kata seperti "cuma" dan "ehh" memperkuat kesan emosional dan seolah-olah menunjukkan keterkejutan atau ketidakadilan yang berlebihan. Pilihan kata “Agama” dan “Negara”, agama merepresentasikan kewajiban spiritual, sementara negara merepresentasikan kewajiban sipil. Kata-kata informal seperti "Cuma" dan "Ehh" memberikan nuansa sinis dan meremehkan terhadap kebijakan pajak negara. Angka-angka spesifik "2,5%" dan "12%" digunakan untuk menekankan perbedaan yang signifikan antara persentase zakat dan pajak. Pengulangan kata "Minta" menekankan bahwa baik agama maupun negara "meminta" sesuatu dari masyarakat. Meme ini menggunakan gaya bahasa perbandingan untuk menyoroti perbedaan persentase antara zakat 2,5% dan pajak 12%.



Gambar 5. Screenshot instagram @muhammad_sugianto_tomia

Dilihat dari segi struktur teks secara makro, meme data 5 pada gambar 5 bertema kritik tajam terhadap kebijakan perpajakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan memberatkan rakyat. Tema ini tergambar melalui permainan kata dalam frasa “Negara Kesatuan Rampok Indonesia,” yang merupakan plesetan dari frasa resmi “Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Perubahan kata “Republik” menjadi “Rampok” menunjukkan narasi bahwa negara dipersepsikan bertindak seperti perampok yang mengambil paksa dari rakyatnya. Visual seorang rakyat kecil yang bersimpuh sambil memberikan uang kepada sosok tikus besar berbaju jas yang dapat dimaknai sebagai representasi pemerintah atau elite penguasa semakin menegaskan kritik tersebut. Tulisan “#PAJAKMENCEKIK” dan “#TOLAKPPN12PERSEN” menguatkan tema bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dirasakan sebagai tekanan berat bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah.

Berdasarkan analisis superstruktur, meme data 5 dalam gambar 5 disusun dengan pola yang dimulai dari judul, dilanjutkan dengan gagasan utama, lalu gagasan pendukung. Indikasi ini tampak dari frasa "Negara Kesatuan Rampok Indonesia" yang ditempatkan pada bagian awal di bagian paling atas dengan huruf besar dan mencolok sebagai judul berfungsi untuk menarik perhatian sekaligus memperkenalkan ide dari meme. Gagasan utama meme ini adalah kritik terhadap negara yang dianggap bertindak seperti perampok terhadap rakyat melalui kebijakan perpajakan yang mencekik. Gagasan tersebut kemudian didukung oleh elemen visual berupa gambar rakyat kecil yang bersimpuh menyerahkan uang kepada sosok tikus besar berbaju jas, simbol

dari kekuasaan yang rakus, serta tagar "#PAJAKMENCEKIK" dan "#TOLAKPPN12PERSEN" sebagai penguat narasi penolakan terhadap kebijakan pajak. Dengan demikian, struktur meme ini menunjukkan pola pengembangan wacana yang sistematis melalui kombinasi judul, gagasan utama, gagasan pendukung, dan visualisasi gambar.

Diliihat dari segi struktur teks secara mikro, meme data 5 pada gambar 5 dapat diketahui secara sindiran satire, dan gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa satire adalah bentuk sindiran yang mengungkapkan kritik secara halus, sering kali dibalut dengan humor atau unsur komedi. Hal ini tampak pada permainan kata dari frasa resmi "Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang diubah menjadi "Negara Kesatuan Rampok Indonesia" sebagai bentuk kritik sosial terhadap negara melalui sindiran yang tajam namun tidak disampaikan secara langsung. Sementara itu, gaya bahasa hiperbola adalah bentuk ungkapan yang dilebih-lebihkan. Dalam meme tersebut, gaya ini tercermin melalui visualisasi rakyat kecil yang berlutut menyerahkan uang kepada sosok tikus besar berbaju jas. Gambaran ini secara berlebihan menunjukkan ketimpangan kekuasaan, menciptakan efek dramatis yang menggambarkan penderitaan masyarakat akibat kebijakan pajak.

4. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Analisis Wacana Kritis pada Meme Politik Terkait Wacana Kenaikan Pajak yang Mencekik di Media Sosial ini membahas dimensi teks berdasarkan model analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk, yang mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Dalam studi ini, dianalisis empat data meme yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu meme yang berisi kritik terhadap kebijakan kenaikan pajak oleh pemerintah, tersebar luas di media sosial, serta memuat unsur wacana politik.

Berdasarkan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk dimensi teks struktur makro terdapat lima tema yang ada di dalam meme politik terkait wacana kenaikan pajak yang mencekik, yaitu cengkraman pemerintah terhadap kebijakan kenaikan pajak yang dianggap memberatkan rakyat, pematokan pajak oleh pemerintah terhadap rakyat, beban PPN 12% bagi rakyat, kritik terhadap kebijakan pajak negara melalui perbandingan dengan kewajiban zakat dalam ajaran Islam, kritik terhadap pemerintah yang dianggap merampok rakyat melalui kebijakan pajak (PPN 12%). Pada aspek superstruktur, terdapat dua data meme yang mengikuti skema dengan pola judul, gagasan utama, lalu diikuti oleh gagasan pendukung. Satu data meme menggunakan pola penyajian berupa gagasan utama tanpa disertai gagasan pendukung. Satu meme lainnya mengikuti pola judul diikuti oleh gagasan utama dan pendukung, dan satu meme Skema yang disusun hanya memuat gagasan utama tanpa disertai penjelasan pendukung. Sementara itu, pada aspek struktur mikro, ditemukan tiga data meme yang menggunakan gaya bahasa sindiran satiris, tiga meme dengan gaya bahasa hiperbola, satu meme dengan gaya retorik, satu meme yang mengandung makna secara semantik, satu meme menggunakan gaya perbandingan, satu lagi mengandung sindiran ironi, dan satu meme terdapat sintaksis.

References

- Aifiansya, S. (2016). Kaum muda, meme, dan demokrasi digital di Indonesia. *Ilmu Komunikasi*, 13(2), 151-164. Diakses dari <https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.676>
- Baharuddin, B. (2021). Meme sebagai kritik wacana dalam akun Memelord@Memefess: Analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). UIN Sunan Ampel Digital Library.
- Bauckhage, C. (2021). Wawasan tentang meme internet. *Prosiding Konferensi Internasional AAAI tentang Web dan Media Sosial*, 5(1), 42-49. Diakses dari <https://doi.org/10.1609/icwsm.v5i1.14097>
- Cahyono, A. (2016). Pengaruh sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9 (1). Diakses dari <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Carlina, G., & Paramita, S. (2017). PR Crisis melalui media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 81-86. Diakses dari <https://doi.org/10.24912/jk.v9i1.211>
- Dawkins, R. (2006). *The selfish gene (30th anniversary ed.)*. Oxford University Press.
- Dewi, R. S. (2019). Kreator meme dan konstruksi makna meme politik di media sosial. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1). Diakses dari [10.24815/jkg.v8i1.13332](https://doi.org/10.24815/jkg.v8i1.13332)
- Liyana, N. (2021). Menelaah rencana kenaikan tarif PPN berdasarkan bukti empiris serta dampaknya secara makro ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124-135. Diakses dari <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394>
- Munfarida, E. (1970). Analisis wacana kritis dalam perspektif norman fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1), 1-19. Diakses dari <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>

- Nabila, R. A. K. (2024, Desember 31). Kenaikan PPN 12 persen untuk perekonomian yang berkelanjutan. ITS Online. Diakses dari <https://www.its.ac.id/news/2024/12/31/kenaikan-ppn-12-persen-untuk-perekonomian-yang-berkelanjutan/>
- Nur, A. S., Emilda, & Mahsa, M. (2023). Analisis wacana kritis model Van Dijk dalam program Mata Najwa “Keadilan Bersyarat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” *Kande*, 4(2), 239–253. Diakses dari <https://ojs.unimal.ac.id/kande/index>
- Permadi, B. A., & Ardan, A. (2022). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020), *Jurnal Ilmiah MEA*, 6(3).
- Rahmani, N. (2022). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. PT Cahaya Rahmat Rahman.
- Ratnaningsih, D. (2019). Analisis wacana kritis: sebuah teori dan implementasi. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Rina, N., Yanti, Y., & Idham, H. (2020). Implicature in the internet memes: Semio-pragmatics analysis. *Journal of Cultura and Lingua*, 1(1), 27–35. Diakses dari: <https://doi.org/10.37301/culingua.v1i1.7>
- Sara Mills. (2001). the New critical idiom. In *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- Savitri, N. (2018). Wacana ekspresi kritik sosial masyarakat terhadap sinetron melalui meme internet. In *Prosiding Semateksos 3: Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Diakses dari: <https://www.viva.co.id/berita/nasio-nal/970835-kpi-kritik-sinetron-indonesia>.
- Sheikh, M. (2025). Social media demographics to inform your 2025 strategy. Sprout Social. Diakses dari: <https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/>.
- Shifman, L. (2013). Memes in a digital world: Reconciling with a conceptual troublemaker. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 18(3), 362–377. Diakses dari: <https://doi.org/10.1111/jcc4.12072>
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. <https://online.anyflip.com/xobw/rfpq/mobile/index.html>
- Van Dijk, T. A. (2014). *Discourse and knowledge a sociocognitive approach*.
- Van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1945). Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1945). Pasal 28E Ayat 2 dan 3. Tentang Kebebasan berekspresi di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1945). Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia.